

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. 2017. *Public Private Partnership dengan Kontrak Build Operate Transfer dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Studi kasus: Ruas Jalan Tol Depok – Antasari dan Ruas Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu)*. Skripsi. Universitas Gadjad Mada. Yogyakarta.
- Arianti. 2015. *Analisis Penerapan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Atas Pengeluaran Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan*. Diploma III (tiga) thesis. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Febrianti. 2015. *Public Private Partnership Ditinjau dari Aspek Akuntansi (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi. Universitas Bina Darma. Palembang.
- Irawati. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sopang*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Izzah. 2012. *Public Private Partnership :Kerja sama Pemerintah dan Privat dalam Pembangunan Infrastruktur*. Dilihat 16 Juli 2012. <<http://andromedazone.blogspot.com/2012/07/public-private-partnership-kerjasama.html>>. (Disarikan dari berbagai sumber).
- Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. 2010. *Jenis-Jenis Perjanjian Kerja sama Pemerintahan dan Privat*.
- Kharisma. 2014. *Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Sektor Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi dan Kelembagaan*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Kurniawan, dkk. 2009. *Analisis Potensi Penerapan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) Dalam Pengembangan Infrastruktur Transfortasi di Perkotaan di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Manopo, F. 2019. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi S1. Universitas Bina Darma. Palembang.
- Mahsyar, Abdul. 2015. *Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Aset Public di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Katholic Parahyangan. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22. 2009 *Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah*.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11. 2009. *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi.*
- Peraturan Menteri PPN No.4. 2010. *Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyedia Infrastruktur.*
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19. 2012. *Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainnya.*
- Peraturan Presiden No. 5. 2010. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014.*
- Peraturan Presiden No. 54. 2010. *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Peraturan Presiden No. 67. 2005. *Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.*
- Peraturan Pemerintah No. 1. 2008. *Tentang Investasi Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah No. 15. 2005. *Tentang Jalan Tol Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009.*
- Peraturan Pemerintah No. 20. 2004. *Tentang Rencana Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah No. 26. 2008. *Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.*
- Peraturan Pemerintah No. 40. 2006. *Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.*
- Peraturan Pemerintah No. 48. 2005. *Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012.*
- Peraturan Pemerintah No. 50. 2007. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No. 59. 2007. *Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.*
- Peraturan Pemerintah No. 67. 2005. *Tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010.*
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 08. 2010. *Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.* Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis.* Salemba Empat. Jakarta.
- Sidik. 2012. *Public Private Partnership :Kerja sama Pemerintah dan Privat dalam Pembangunan Infrastruktur.* Dilihat 16 Juli 2012.
<<http://andromedazone.blogspot.com/2012/07/public-private-partnership-kerjasama.html>>. (Disarikan dari berbagai sumber).
- Undang-Undang No. 22. 2001. *Tentang Minyak dan Gas Bumi.*
- Undang-Undang No. 23. 1997. *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang No. 25. 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang No. 25. 2007. *Tentang Penanaman Modal.*
Undang-Undang No. 27. 2003. *Tentang Panas Bumi.*
Undang-Undang No. 27. 2008. *Tentang Penataan Ruang.*
Undang-Undang No. 30. 2009. *Tentang Ketenagalistrikan.*
Undang-Undang No. 32. 2009. *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*
Undang-Undang No. 38. 2004. *Tentang Jalan.*
Undang-Undang No. 41. 1999. *Tentang Kehutanan.*
Waluyo. 2019. *Akuntansi Pajak: Akuntansi Kontrak Kontruksi*, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.